

## Tinjauan Perspektif Ekonomi Politik dalam Tata Niaga Tembakau

Andri Prasetyo<sup>1</sup>, Bhimo Rizky Samudro<sup>2</sup>  
Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan FEB UNS<sup>1</sup>  
Program Studi Ekonomi Pembangunan FEB UNS<sup>2</sup>  
prasandri86@gmail.com<sup>1</sup>  
bhimosamudro@staff.uns.ac.id<sup>2</sup>

### *ABSTRACT*

*Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pola hubungan yang terjadi antara perusahaan rokok, tengkulak dan petani tembakau dalam konteks ekonomi politik. Fakta umum menunjukkan bahwa aspek harga merupakan titik ketergantungan struktural petani tembakau pada perusahaan dan tengkulak. Pola ini ditelaah secara detail dengan konstruksi prinsip core-periphery dalam ekonomi politik. Pendekatan deskriptif didukung dengan studi pustaka dan dianalisis dengan pendekatan analisis isi. Hasil yang diperoleh adalah, pertama, skema pola ketergantungan antara perusahaan, tengkulak dan petani. Kedua, kebijakan pemerintah dalam memutus mata rantai ketergantungan struktural. Berdasarkan hasil tersebut, artikel ini mengusulkan cara-cara optimal untuk mengendalikan keterkaitan struktural antara perusahaan, tengkulak, dan petani tembakau.*

*Keywords : Ekonomi Politik, Petani Tembakau, Tata Niaga, Cigarette,*

### A. Pendahuluan

Lebih dari empat abad tembakau masuk ke Jawa dan tradisi merokok, sudah menjadi bagian budaya masyarakat Indonesia (akulturasi) sedemikian lama, yang tidak hanya tinggal di Jawa (Sunaryo, 2013). Tembakau merupakan salah satu komoditas yang sangat penting. Karna peran tembakau dalam kehidupan ekonomi masyarakat sangat besar yaitu sebagai salah satu sumber pendapatan petani, buruh, dan pedagang, bahkan pendapatan daerah.

Industri tembakau di Indonesia telah dimulai sejak lama, dan sumbangsih dari industri tersebut tidak kecil nilainya. APBN tahun 2019 menargetkan Rp.158,9 Trilyun pendapatan negara diperoleh dari Cukai hasil tembakau.

Pada tahun 2000 Indonesia berhasil mencapai produksi sejumlah 200.000 ton tembakau. Dan pada puncaknya pernah mengalami jumlah produksi hingga

260,818 ton di tahun 2013. Tetapi capaian tersebut hingga tahun 2014 mengalami penurunan drastis ke angka 164,448 ton dan tidak pernah lagi mencapai 200.000 ton hingga tahun 2017 (BPS, 2017).

Produksi tembakau dalam negeri saat ini masih di bawah 200.000 ton per tahun, sedangkan permintaan pasar telah mencapai lebih dari 300.000 ton per tahun, impor tembakau Indonesia berkisar 100.000 ton per tahun (Industry Update Bank Mandiri, 2017).

Industri hilir tembakau menghasilkan banyak keuntungan bagi pemilik pabrik rokok dan pemerintah, karena mendapatkan banyak pemasukan cukai dari pengenaan cukai hasil tembakau yang terus naik setiap tahunnya. Naiknya cukai tembakau tidak akan dibebankan pada konsumen, dan perusahaan rokok yang telah memiliki pangsa pasar tetap akan tetap mendapatkan keuntungan dari hasil penjualannya. Tetapi persoalannya bukan itu, menurut Lubis (2015) yaitu masalah ketidakadilan dan monopoli perdagangan tembakau oleh para grader pabrikan. kendala utama petani tembakau adalah masalah penentuan kualitas dan harga tembakau. Sering kali terjadi perbedaan klaim kualitas tembakau antara petani dengan pihak pembeli. Ketidakpastian dan tidak adanya standard ini yang menyebabkan petani menjadi merugi.

Tidak berdayanya petani tembakau dalam tataniaga tembakau meliputi penentuan harga, penentuan kualitas tembakau dan penentuan berat tembakau. Kondisi ini menimbulkan kerugian bagi petani karena para juragan dapat dengan mudah mempermainkan harga. Dengan peraturan daerah baru tentang tataniaga tembakau diharapkan monopoli harga tidak lagi terjadi pada proses jual beli tembakau. Terbukanya peluang manipulasi atau permainan mafia dari kalangan elit. Dalam perspektif ekonomi politik, peran birokrat pengusaha cukup signifikan akan mempengaruhi proses ekonomi. Maka dalam penelitian ini ingin melihat bagaimana pola hubungan perusahaan rokok, tengkulak, dan petani tembakau dalam perspektif Core-Periphery

## **B. LANDASAN TEORI**

### **I. Tata Niaga atau Jalur Pemasaran**

Kegiatan tataniaga merupakan kegiatan produktif karena memberikan kegunaan bentuk, waktu tempat dan milik (Sudiyono, 2002). Menurut Hanafiah dan Saefudin, (1983), lembaga tataniaga terdiri dari golongan produsen, konsumen dan pedagang perantara dan lembaga pemberi jasa.

Hanafiah dan Saefudin, (1983) menyebutkan bahwa dua strategi pokok meningkatkan efisiensi tataniaga yaitu : memperluas pasar komoditi dan memperkecil margin tataniaga yaitu : Perluasan komoditi ditempuh dengan dua cara yaitu memperbesar permintaan konsumen akhir dan melaksanakan tata niaga tertata (ordery marketing) yaitu dengan memanfaatkan secara maksimal potensi pasar yang ada dengan mengatur penyaluran barang kedalam pasar menurut waktu, tempat, pemakaian dan golongan konsumen.

Jalur pemasaran hasil pertanian adalah saluran yang digunakan petani produsen untuk menyalurkan hasil pertanian dari produsen sampai ke konsumen. Lembaga-lembaga yang ikut aktif dalam saluran ini adalah petani produsen, pedagang pengumpul, pedagang besar, pengecer, dan konsumen. Setiap lembaga tataniaga ini melakukan fungsi-fungsi tataniaga seperti: membeli dari petani (produsen) menjual kepada pedagang berikutnya, mengangkat, menyortir, menyimpan, dan lain-lain (Rahardi, 1993).

## II. Ekonomi Politik Marxism

Heilbroner (1960) mengatakan “*socialism - defined as a centrally planned economy in which the government controls all means of production - has been the tragic failure of the 20th century: born of a commitment to remedy the economic and moral defects capitalism, it has far surpassed capitalism in Perth economic multi-function and moral cruelty*”, Sosialisme - didefinisikan sebagai ekonomi yang direncanakan secara terpusat di mana pemerintah mengendalikan semua alat produksi - telah menjadi kegagalan tragis abad ke-20 lahir dari komitmen untuk memperbaiki cacat ekonomi dan moral kapitalisme, ia telah jauh melampaui kapitalisme baik di bidang ekonomi multifungsi dan kekejaman moral.

Dalam pendekatan Ekonomi Politik Marxis pembahasannya dilakukan begitu komprehensif, yaitu adanya *interconnect* semua jenis lembaga-lembaga sosial yang ada. Sehubungan dengan hal ini mengaku bahwa “keserbamencakup” adalah kelebihan utama pendekatan mereka. Pendekatan yang serba mencakup ini menurut Marx jauh lebih baik dibandingkan dengan prosedur deduktif ekonomi politik klasik dalam analisisnya, menggabung metode dialektik dengan materialisme (Deliarnov, 2018). Oleh, kombinasi ini kemudian disebutnya sebagai "materialisme dialektik" atau "materialisme historikal". Dengan pendekatan yang serba mencakup ini para penganut Marxis percaya bahwa "*the world must be understood as it basically a single, integrated unit*" dan bahwa inti dari marxisme bukanlah ide yang dilandaskan pada ekonomi melainkan pada metode totalitas.

## III. Core-Periphery

Konsep pusat pinggiran (Core-Periphery) dinyatakan dalam berbagai pandangan oleh ilmuwan sosial. Salahnya adalah Friedmann (1966), Ia membagi dunia ini menjadi dua bagian besar yaitu Pusat yang dinamis dan pinggiran yang statis, dan mengusulkan 4 wilayah sebagai berikut :

1. Daerah Pusat adalah dikonsentrasikan perekonomian metropolitan dengan kapasitas tinggi untuk inovasi dan perubahan. Terlihat seperti jaringan hierarki dari Ibukota Negara sampai daerah terpencil.
2. Daerah Peralihan Atas adalah berbatasan dengan pusat, cocok bagi pengembangan dan eksploitasi sumberdaya. Ciri khas Daerah peralihan atas ialah pengembangan di sepanjang jalan raya dua kota besar.

3. Daerah Batas Sumber Daya adalah wilayah pinggiran permukiman baru.
4. Daerah Peralihan bawah adalah daerah yang stagnasi atau menurun kemampuannya,

Menurut Myrdal (*core region*) adalah sebagai magnet yang dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan sendirinya, karena adanya sebab-sebab kumulatif ke arah perkembangan (*cumulative upward causation*), seperti arus buruh dari pinggiran ke pusat (P ke C) terkait kebutuhan tenaga trampil, modal dan barang-barang perdagangan yang secara spontan berkembang didalam ekonomi pasar bebas untuk menunjang pertumbuhan di suatu lokasi atau wilayah tertentu (Hendrick, 1988).

Analisa Myrdal memberikan kesan pesimistis, ia berpendapat bahwa polarisasi muncul lebih kuat dari pada penyebaran pembangunan, permintaan faktor-faktor produksi akan menumpuk di daerah-daerah perkotaan yang memberikan manfaat kepadanya, dan sebaliknya di daerah perdesaan yang tidak menguntungkan akan menipis.

Wallerstein dalam (Effendi dan Malihah, 2011:65) bahwa perekonomian kapitalis dunia terbagi atas tiga jenjang, yaitu: negara-negara inti (*core*), negara-negara semi periferi (*semi-Periphery*), dan negara-negara periferi (*Periphery*). Inti dari pandangan Wallerstein bahwa ia menentang dunia yang bipolar dimana hanya ada kutub negara kuat (*Core*) dan negara lemah (*Periphery*).

Konsep Core-Peripheri dalam hubungan petani tembakau dan perusahaan rokok ialah perusahaan rokok sebagai Core dan petani tembakau sebagai pihak periphery.

### C. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya (West, 1982 dalam Sukardi, 2004). Penelitian ini juga sering disebut non-eksperimen, karena pada penelitian ini peneliti tidak melakukan kontrol dan manipulasi variabel penelitian. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi, termasuk tentang hubungan, kegiatan, sikap, pandangan, serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena.

Dengan metode deskriptif, peneliti memungkinkan untuk melakukan hubungan antar variabel, menguji hipotesis, mengembangkan generalisasi, dan mengembangkan teori yang memiliki validitas universal ( West, 1982 dalam Sukardi, 2004). Di samping itu, penelitian deskriptif juga merupakan penelitian, di mana pengumpulan data untuk menguji pertanyaan penelitian atau hipotesis yang berkaitan dengan keadaan dan kejadian sekarang. Mereka melaporkan keadaan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya.

Metode deskriptif dalam penelitian ini untuk mengetahui pola hubungan yang terjadi antara perusahaan rokok, tengkulak dan petani tembakau, serta

menggunakan pendekatan metode konten analisis, yaitu analisis secara mendalam tentang suatu isu-isu atau informasi yang telah dipublikasikan.

## C. DISKUSI DAN PEMBAHASAN

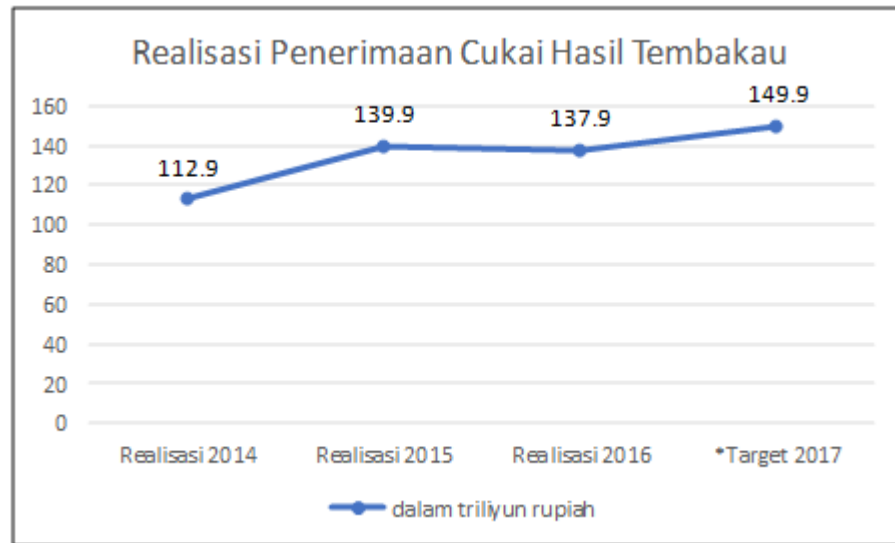
### I. Keuntungan Pemerintah dan Perusahaan Rokok

Dari sisi produksi Indonesia merupakan salah satu produsen terbesar tembakau di dunia. Indonesia berada pada urutan ke-6 sebagai produsen terbesar tembakau dunia. Produksi Indonesia sebesar 1,91% produksi tembakau dunia. Sedangkan produksi tembakau di China, Brazil dan India menghasilkan 64% dari total produksi dunia (Kementerian Kesehatan RI, 2013. [www.depkes.go.id](http://www.depkes.go.id)).

Dalam dokumen yang dikeluarkan oleh Kementerian keuangan melalui direktorat Jendral Penyusunan APBN dan Direktorat Jendral Anggaran ([www.depkeu.go.id](http://www.depkeu.go.id)), dokumen tersebut berisi tentang informasi APBN 2017. Dalam dokumen tersebut penerimaan cukai pada tahun 2017 ditarget sebesar Rp 157,2 triliun, dengan pembagian Rp 149,9 triliun berasal dari cukai hasil tembakau, Rp 0,2 triliun berasal dari cukai alkohol, Rp 5,5 triliun berasal dari cukai MMEA, Rp 1,6 triliun berasal dari jenis cukai lainnya.

Laporan kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tahun 2016 mencatat bahwa realisasi penerimaan cukai hasil tembakau tahun 2016 sebesar Rp 137,9 triliun, tahun 2015 sebesar Rp 139,9 triliun, sedangkan pada tahun 2014 realisasi sebesar Rp 112,9 triliun. Dengan kata lain, pertumbuhan penerimaan cukai hasil tembakau pada tahun 2015 mengalami pertumbuhan sebesar 23,67% dari pada tahun 2014. Sedangkan pertumbuhan pada tahun 2016 terdepresiasi (-1,41%) dari pada tahun 2015.

#### Grafik Realisasi Penerimaan Cukai tahun 2014-2017\*



Sumber: *Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan 2017*

Tidak hanya pemerintah yang mendapatkan banyak keuntungan dari perputaran industri tembakau. Tetapi para pemilik pabrik atau perusahaan yang notabene adalah mitra Petani Tembakau juga menikmati keuntungan yang tidak kecil jumlahnya.

**Tabel Daftar laba 4 Emiten perusahaan rokok di BEI (dalam juta rupiah)**

No.	Perusahaan	Laba 2018	Laba 2017
1	Gudang Garam (GGRM)	7.793.068	7.755.347
2	HM Sampoerna (HMSP)	13.538.418	12.670.534
3	Wishmilak (WIIM)	52.186.278.119	44.172.542.990
4	Bentoel (RMBA)	(608,463)	(480,063)

Sumber : diolah dari laporan keuangan tahunan 4 perusahaan tersebut.

## II. Tata niaga tembakau di beberapa daerah Indonesia

Dewasa ini produk tembakau sangat gencar dilawan oleh para kalangan aktivis-aktivis anti tembakau, hal tersebut berawal dari sebuah kerangka kerja yang disahkan oleh PBB yaitu Framework Convention of Tobacco Control (FCTC). Kerangka kerja tersebut dimaksudkan untuk mengurangi konsumsi tembakau di seluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia. Namun Indonesia sendiri hingga saat ini tidak kunjung untuk meratifikasi kerangka kerja tersebut karena memiliki alasan yang cukup rasional yaitu melindungi petani tembakau yang tersebar di berbagai banyak tempat Indonesia.

Tetapi Sebagai produk yang tidak diawasi tembakau adalah barang bebas yang bisa diperdagangkan siapa saja, kapan saja, dan dimana saja, dan tidak lepas dari perilaku pasar yang berkaitan dengan supply dan permintaan, cara, bentuk dan waktu penyajian, kebijakan-kebijakan penjual dan pembeli, jalur pemasaran, serta pendekatan-pendekatan.

Niat baik pemerintah untuk melindungi petani tembakau ternyata tidak atau kurang berjalan maksimal. Hingga saat ini tata niaga tembakau di Indonesia masih tidak jelas, banyak petani kurang paham tentang mekanisme perdagangan tembakau sehingga memunculkan pialang tembakau atau bandol. Hal tersebut merujuk pada penelitian Santoso (2001) sebagai berikut:

*Pabrik rokok akan memberitahukan kepada juragan tentang tembakau yang diperlukan, jumlah serta kualitasnya, dan bila perlu harga tertinggi yang disanggupi akan dibayar. Sebaliknya, petani tembakau menyatakan kepada bandol tentang tembakau yang hendak di jualnya, dengan atau tanpa menentukan harga serendah-rendahnya yang diminta. Juragan dan bandol selalu mengadakan hubungan dengan relasinya. Dengan demikian tawar menawar antara pembeli dan penjual tidak banyak memakan waktu. Apabila ada kesepakatan tentang harga, persetujuan jual-beli dapat segera ditutup.*

Penjualan tembakau dengan pola seperti yang terjadi di atas sangat tidak efisien karena membentuk rantai distribusi yang panjang.

Di daerah Temanggung yang juga merupakan salah satu daerah penghasil tembakau Indonesia, juga terdapat kasus tentang rantai distribusi yang panjang seperti kasus di atas. Merujuk pada penelitian Sari dan Rusdijati (2015) bahwa petani tidak langsung menjual tembakaunya ke pabrik rokok, melainkan harus melewati “tangan kedua” terlebih dahulu yaitu tengkulak. Hal tersebut akan melimpahkan semua risiko tata niaga tembakau kepada petani.

*Tata niaga tembakau di Kabupaten Temanggung adalah petani sebagai produsen akan dijual ke perantara (pedagang, pengepul, tengkulak, juragan) selanjutnya dibawa ke grader sebagai wakil dari pabrikan. Masing-masing grader akan membangun jaringan ke perantara baik secara eksklusif maupun tidak. Petani tidak memiliki kemampuan untuk menentukan kategori kualitas dan harga tembakau yang diproduksi. Namun ketika dalam tata niaga, penentuan kualitas dan harga di tingkat perantara sering berbeda dengan yang ditentukan oleh grader sebagai wakil pabrikan. Semua resiko ditanggung oleh petani.*

Rantai distribusi yang panjang tersebut sangat merugikan petani, yang sekiranya lebih tidak adil bagi petani adalah penentuan harga tembakau tidak oleh petani sendiri, melainkan oleh pabrik atau tengkulak. Sunaryo (2001) melihat tata niaga tembakau di Pamekasan sangat di adil

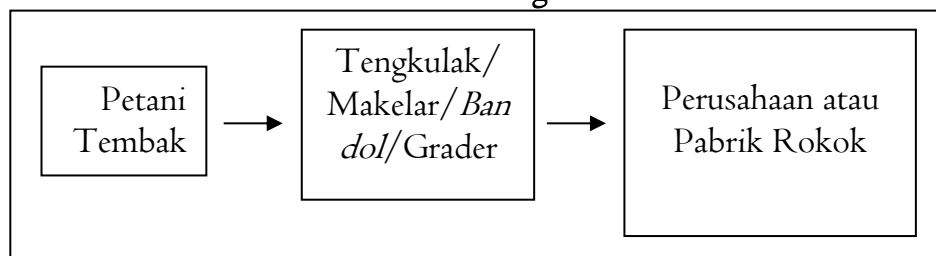
bagi petani, yang mana harga ditentukan oleh pembeli yang sifatnya monopolistik dan tidak sesuai harapan petani terkait hasil penjualannya. Penentuan harga dan kualitas sangat tergantung dari keputusan pedagang atau bandol atau juragan. Sehingga dengan sangat terpaksa meskipun itu merugikan para petani harus mengikuti keputusan mereka terkait dengan penentuan kualitas dan harga, kalau tidak, maka konsekuensinya tembakau tersebut tidak akan dibeli.

Temuan lain dari penelitian Fauziyah et al. (2010), dari rumitnya tata niaga tembakau, masih ada lagi makelar tembakau yang membeli dengan sistem tebasan. Posisi makelar itu berada di bawah dari bandol atau downline.

*Pedagang ini merupakan asisten bandol yang tugasnya untuk menyuplay atau membantu bandol dalam mendapatkan tembakau dari para petani. Sedangkan tukang tongko' ini atau bandol hanya cukup duduk manis menyaksikan sortiran yang dilakukan juragan. Apabila sudah ada kesepakatan harga, maka terjadilah. Tukang tongko' ini akan memperoleh komisi dari pedagang atau petani. Komisi yang diterima biasanya sebesar Rp 1.000/kg.*

Rantai distribusi yang panjang ini juga dialami oleh petani tembakau yang ada di kabupaten Jember, temuan penelitian oleh (Prasetyo & Samudro, 2019) bahwa harga tembakau ditentukan sepihak oleh tengkulak yang merupakan kaki tangan dari pabrik atau perusahaan atau industri rokok. Fenomena tersebut membuat ketetapan penentuan harga menjadi milik para tengkulak dan industri rokok, sehingga memberikan posisi tawar yang tinggi dan sebaliknya bagi petani memiliki posisi tawar yang rendah dan selalu kalah. Di samping itu menumbuhkan ketergantungan sangat tinggi kepada tengkulak.

**Gambar Alur tata niaga tembakau**



Sumber : diolah

Gambar di atas adalah pola yang terjadi dalam tata niaga tembakau dari berbagai kasus di atas, jika mengkaji dengan prinsip political economy core-periphery bahwa penentuan harga sepenuhnya oleh perusahaan melalui kepanjangan tangannya yaitu para tengkulak atau bisa disebut makelar/bandol.



Gambar pola Core-Periphery penentuan harga tembakau



Sumber : Diolah

Lebih sederhana pola Core-Periphery dari tata kelola tembakau bisa dilihat dari gambar di atas, yang mana dalam konsep Core-Periphery ada pihak yang disebut sebagai inti dan pihak yang disebut sebagai pinggiran. Industri rokok dan atau para tengkulak adalah pihak core yang menjadi penentu dalam harga tembakau mereka secara sepihak menentukan harga tembakau dengan dasar kualitas tembakau yang dinilai oleh mereka sendiri. Sedangkan petani tembakau sebagai periphery-nya harus menerima begitu saja keputusan harga dan kualitas dari perusahaan atau tengkulak dan tidak bisa berbuat apa-apa atas keputusan yang dari pihak core.

Sebuah penelitian yang berfokus pada pengaruh kemitraan terhadap risiko usaha tani tembakau di kabupaten Bojonegoro oleh Fanani (2015) mengungkapkan bahwa petani yang bermitra dengan PT Gudang Garam Tbk, dapat mengurangi kerugian yang dialami petani akibat adanya risiko produksi dan harga. Penerapan sistem Intensifikasi Tembakau Rakyat Kemitraan (nama program kemitraan PT. Gudang Garam Tbk.), selain memberikan produktivitas lebih tinggi dibandingkan petani non mitra, juga dapat menghasilkan tembakau yang memiliki kualitas lebih baik, pendapatan petani menjadi lebih tinggi. Hubungan kemitraan yang dilakukan oleh petani tembakau dengan PT. Gudang Garam, Tbk merupakan hubungan yang saling menguntungkan antara petani dan perusahaan rokok. Petani memiliki lahan dan tenaga pelaksana, sedangkan pabrik rokok meminjamkan modal tanpa bunga dan agunan. Dengan adanya pendampingan teknis dan bantuan permodalan, risiko produksi yang dialami petani menjadi berkurang.

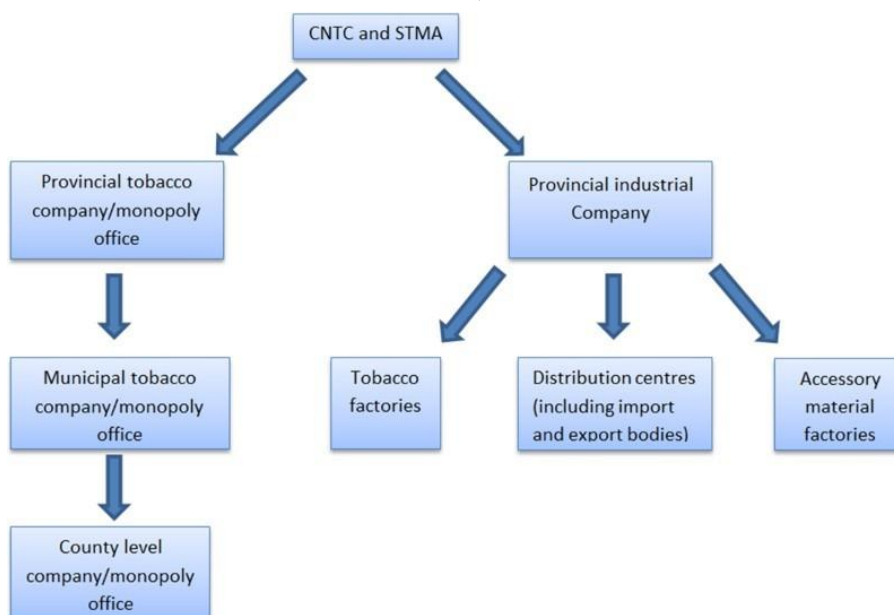
### III. Tata Niaga Tembakau di China

China atau Tiongkok adalah negara di dunia dengan jumlah penduduk paling besar serta dengan jumlah konsumsi tembakau atau rokok paling banyak di dunia. Perusahaan rokok di Tiongkok China National Tobacco Corporation (CNTC) merupakan badan usaha milik negara yang dikontrol langsung oleh State Tobacco Monopoli Administration (STMA) dan seluruh sahamnya milik kementerian keuangan.

CNTC melakukan perencanaan pusat, mengelola bahan mentah, menetapkan kuota produksi regional untuk daun dan produk, dan merupakan perusahaan payung untuk perusahaan provinsi. Sedangkan tugas dari STMA meregulasi monopoli nasional dengan struktur paralel di tingkat provinsi yang diatur oleh pemerintah kota dan provinsi. Atau dengan bahasa yang lebih sederhana STMA mengelola monopoli, China Tobacco adalah badan hukum yang bertanggung jawab untuk pemasaran, produksi, distribusi, dan penjualan produk tembakau.

CNTC memegang 42% global market share rokok di dunia (global.tobaccofreekids.org, 2017), sebab jumlah konsumsi rokok terbesar adalah Tiongkok sendiri dengan jumlah hampir 300 juta perokok. CNTC mempekerjakan 510.000 orang di 33 provinsi dan menyumbangkan 7–11% pendapatan pajak pemerintah setiap tahun. Dalam skala global, keuntungan CNTC melebihi British American Tobacco (BAT), Philip Morris International (PMI). Semua kesuksesan CNTC dilakukan hanya dengan orientasi perdagangan domestik (Fang, Lee, and Sejpal, 2017).

**Gambar Struktur Kerja CNTC dan STMA**



**Sumber:** *Global Public Health*, 2017.

(<https://doi.org/10.1080/17441692.2016.1241293>)

Seiring kebijakan “GO GLOBAL” yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok pada tahun 2000 di mana semua perusahaan-perusahaan Tiongkok diharapkan untuk meningkatkan pengembangan produk, mengejar pasar luar negeri, dan membangun manufaktur di luar negeri. Maka, pada pertengahan 2000-an CNTC mulai terlihat menggeser fokus pasar domestik ke pasar luar negeri melalui empat cara (Fang, Lee, and Sejpal, 2017).

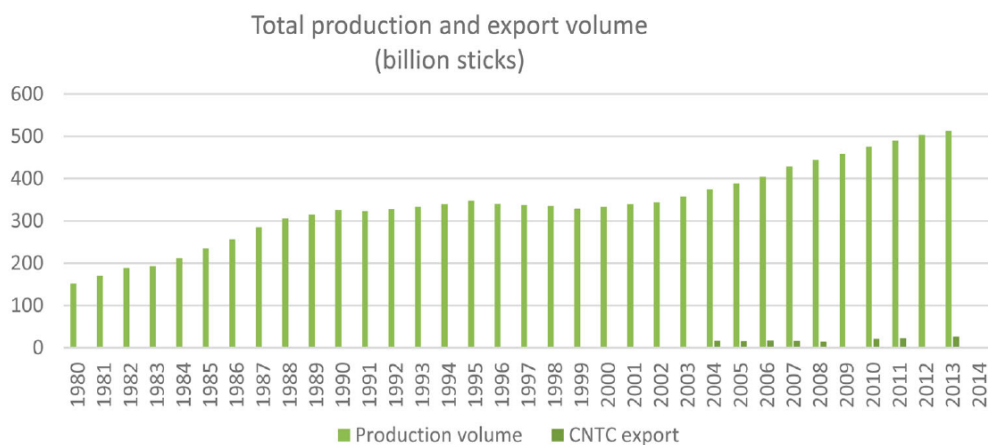
Pertama, CNTC sebagai “pencari sumber daya alam”, oleh karena itu industri bertujuan mencari sumber daun berkualitas sesuai dengan kualifikasi merek-merek rokok internasional. Serta membentuk perusahaan pengadaan daun lokal di daerah-daerah penanaman tembakau utama di Brasil, Zimbabwe dan Amerika Serikat, guna menjamin pasokan yang stabil untuk memenuhi kebutuhan industri yang sedang tumbuh baik di dalam maupun di luar negeri.

Kedua, CNTC “mencari pasar”. CNTC telah melakukan ekspor sejak tahun 1980-an, tetapi skala dan jangkauan ekspornya terlihat lebih terpadu sejak akhir tahun 2000-an.

Ketiga, CNTC melakukan “efisiensi”, dengan mengurangi biaya operasional untuk margin keuntungan yang lebih besar. CNTC juga mendirikan operasi di luar negeri guna menyerap daun tembakau lokal dan merekrut penduduk setempat jika memungkinkan, sehingga meningkatkan efisiensi dengan menghilangkan hambatan budaya dan bahasa. Lokasi strategis dari basis produksi lepas pantai utama di masing-masing wilayah adalah indikasi yang jelas dari pencarian efisiensi.

Keempat, CNTC adalah “pencari aset strategis”, karena memantau pasar luar negeri yang mencari peluang investasi untuk pertumbuhan bisnis melalui merger dan akuisisi (M & A). Maka, upaya globalisasi CNTC diharapkan akan meningkat.

**Gambar Total Produksi dan Ekspor CNTC (miliar batang)**



**Sumber:** Global Public Health, 2017. (<https://doi.org/10.1080/17441692.2016.1241293>)

China National Tobacco Corporation (CNTC) memiliki keunikan tersendiri, perusahaan tersebut merupakan satu-satunya di dunia yang melakukan monopoli tembakau secara sempurna dan begitu tertata sebab mengadopsi manajemen terpusat selayaknya pemerintahan Tiongkok yang mana selaras teori Karl Marx.

Dari pemaparan di atas terdapat kesamaan pola yang terjadi tentang manajemen rantai pasok yang di Indonesia maupun di Tiongkok. Pihak perusahaan

sebagai pemegang kendali dalam penentuan harga tembakau, meskipun terdapat perbedaan jenis pasar yang terjadi. Jika di Indonesia pasar yang terjadi adalah pasar Oligopoli, sedangkan di Tiongkok adalah pasar monopoli dengan perusahaan tunggal, dan petani tidak memiliki alternatif penjualan.

## E. KESIMPULAN

Rantai distribusi yang panjang menyebabkan tata niaga tembakau merugikan petani. Para petani menerima keputusan harga sepihak yang dilakukan oleh perusahaan rokok melalui tengkulak/bandol/makelar dan sejenisnya, hal tersebut terjadi berbagai daerah penghasil tembakau di Indonesia. Terbentuk pola Core-periphery pada rantai distribusi tembakau yang mana, para pabrik atau perusahaan rokok dan tengkulak/bandol/makelar dan sejenisnya menjadi pihak Core atau inti yang menentukan keputusan, dan pihak petani tembakau adalah pihak periphery atau pinggiran yang menerima akibat keputusan dari core.

Dalam penentuan harga jual tembakau, petani merupakan pihak yang paling terdampak, dan tidak mampu untuk menentukan harga tembakau. Yang bisa dilakukan petani tembakau hanyalah membuat kualitas tembakau mereka menjadi lebih baik dari musim-kemusim guna mendapatkan harga jual yang tinggi.

Tata niaga tembakau di Indonesia maupun di Tiongkok terdapat kesamaan pola Core-Periphery, yang mana penentu harga tembakau adalah perusahaan, sedangkan petani hanya penerima akhir. Namun kecenderungan petani di Indonesia mendapatkan harga yang lebih baik masih bisa dimungkinkan. Karena jika salah satu perusahaan membeli dengan harga rendah, petani masih bisa memiliki alternatif untuk menjual tembakau pada perusahaan lain.

## REFERENCES

- Deliarnov. (2018). *Ekonomi Politik*. Penerbit Erlangga.
- Effendi, R., & Malihah, E. (2011). *Panduan Kuliah Pendidikan Lingkungan Sosial, Budaya dan Teknologi*. CV Maulana Media Grafika.
- Fanani, A. et al. (2015). Pengaruh Kemitraan Terhadap Risiko Usahatani Tembakau Di Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Manajemen & Agribisnis*, *12*(3), 194–203. <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jmagr/article/view/11012/8495>
- Fang, J., Lee, K., & Sejpal, N. (2017). The China National Tobacco Corporation: From domestic to global dragon? *Global Public Health*, *12*(3), 315–334. <https://doi.org/10.1080/17441692.2016.1241293>
- Fauziyah, E., Hartoyo, S., Kusnadi, N., & Kuntjoro, S. U. (2010). ANALISIS PRODUKTIVITAS USAHATANI TEMBAKAU DI KABUPATEN PAMEKASAN. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, *6*(2), 119–131. <https://doi.org/https://doi.org/10.33830/jom.v6i2.287.2010>
- Friedmann, J. (1966). *Regional Development Policy: A Case Study of Venezuela*. M.I.T. Press.

- Hanafiah, & Saefudin, A. M. (1983). *Tataniaga Hasil Perikanan*. UI Press.
- Heilbroner, R. L. (1960). *The Future as History: The historic currents of our time and the direction in which they are taking America*. Harper & Row.  
<http://library.lol/main/2956DA017C2AD03744963F2FB5196600>
- Hendriks, J. & M. R. (1988). *Konsep dan Teori Pembangunan, Nr XII*. Fakultas Geografi UGM.
- Lubis, H. (2015). Ketidakberdayaan Petani Tembakau Madura dalam Tataniaga Tembakau Madura (study di kabupaten pamekasan). In I. Dzulkarnaen (Ed.), *Bunga Rampai Sosiologi Madura* (pp. 174–201). Elmatara Publishing.
- Prasetyo, A., & Samudro, B. R. (2019). Dinamika di Balik Kampanye Anti-Tembakau: Sebuah Pendekatan Ekonomi Politik. *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Untidar*, 176–196.  
<https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/semnasfe/article/view/2082>
- Santoso, T. (2001). Tata Niaga Tembakau di Madura. *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan*, 3(2), 96–105.  
<http://puslit.petra.ac.id/journals/management/>. 96.
- Sari, K. P., & Rusdijjati, R. (2015). PERSEPSI PETANI TENTANG TATA NIAGA TEMBAKAU DI KABUPATEN TEMANGGUNG. *THE 2ND UNIVERSITY RESEARCH COLLOQUIUM*, 78–89.  
<https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/psnI20I20I0/issue/view/204>
- Sudiyono, A. (2002). *Pemasaran Pertanian*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Sukardi. (2004). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bumi Aksara.
- Sunaryo, T. (2001). Tata Niaga Tembakau di Madura. *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan*, 3(2), 96–105.  
<http://jurnalmanajemen.petra.ac.id/index.php/man/article/view/I56I2/I5604>
- Sunaryo, T. (2013). *Krettek: Pusaka Nusantara*. Serikat Kerakyatan Indonesia (Sakti) dan Center for Law and Order Studies (CLOS).

